

Dukungan Cina Terhadap Program Nuklir Iran (2006-2009)

Agung Nugroho*

Abstract

The research will describe China's foreign policy over Iran's nuclear program in international politics. The study of this research includes how China to reach the national interest, submit its support for Iran's nuclear program. China is one of security council member of united nations that posses veto right permanently, so that China's role is related to significant influence toward Iran's nuclear program and middle east and international stability. The research applies realism approach in explaining China's motivation to implement its foreign policy in supporting Iran's nuclear program with nations-state level analysis. The research applies qualitative method. The research describes that China's attempts to maintain its energy security by submitting its support over Iran's nuclear program.

Keywords: *Nuclear Program, Influence, Foreign Policy, Middle East.*

Pendahuluan

Iran merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang saat ini menjadi sorotan dunia internasional. Hal ini terjadi karena pemerintah Iran memutuskan untuk melanjutkan program nuklir pada tahun 2002, setelah dihentikan sejak tahun 1979. Pemerintah Iran beralasan bahwa program nuklir yang dilakukan oleh negaranya tidak ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir melainkan untuk keperluan medis dan pembangkit tenaga listrik, sehingga tidak ada alasan bagi negara-negara di dunia untuk menghentikan program tersebut.

Kebijakan pemerintah Iran ini mengundang reaksi keras dari negara-negara di dunia khususnya Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun Iran berulang kali menyatakan bahwa program nuklirnya bertujuan

* Alumni Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

untuk kepentingan damai, namun negara-negara Barat (AS dan Eropa) menganggap kebijakan tersebut sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia internasional. Melalui Dewan Keamanan PBB (DK PBB), AS manggalang dukungan internasional untuk memberikan sanksi terhadap Iran.

Namun sikap negara-negara Barat tersebut tidak diikuti oleh dua anggota tetap DK PBB lainnya yaitu Cina dan Rusia, kedua negara tersebut bila diamati menunjukkan sikap penentangannya terhadap AS. Cina walaupun tidak secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap program nuklir Iran, namun setiap AS dan Eropa mengusulkan pemberian sanksi terhadap Iran, Cina selalu menolak dengan menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberikan sanksi karena Iran telah membuka pintu negosiasinya. Dalam menyikapi masalah nuklir Iran ini, Cina terlihat sangat hati-hati khususnya terhadap kemungkinan agenda AS di Timur Tengah.

Pada akhir tahun 2005 resolusi DK PBB dirancang dan diusulkan oleh negara-negara Eropa yakni Inggris, Perancis dan Jerman serta didukung Amerika Serikat dengan mengusulkan penghentian penjualan atau suplai peralatan, teknologi atau keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk program nuklir Iran. Namun Cina didukung Rusia yang juga memegang hak veto dalam DK PBB mengajukan amandemen atas rancangan resolusi tersebut. Hampir separuh dari rancangan itu diusulkan untuk direvisi. Poin penting dari revisi tersebut ialah Cina mengusulkan bahwa masing-masing negara boleh memutuskan sendiri barang-barang yang bisa dibeli Iran tanpa ada intervensi dari Negara lain.

Pertumbuhan ekonomi dan industri Cina yang pesat, memaksa Cina untuk menentukan sikap politik yang penuh perhitungan karena harus bersaing dan berhadapan dengan berbagai kekuatan dunia. Poin penting bagi Cina dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri adalah menjaga stabilitas pasokan energi didalam negeri. Sikap politik ini dapat diartikan pula bahwa Cina akan berusaha

menjalin kerjasama dengan semua negara di dunia yang memiliki sumber-sumber energi (minyak) meski harus berhadapan dengan realitas politik yang tidak menguntungkan. Hal ini terjadi karena cadangan energi yang dimiliki Cina tidak sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka Cina harus mengimpor minyak dari berbagai negara di dunia. Iran adalah salah satu negara penyuplai minyak bagi Cina, Iran memasok hingga 12% dari total kebutuhan minyak Cina. Bahkan Cina dan Iran terlibat kerjasama dalam eksplorasi ladang-ladang minyak baru di Iran. Dalam proyek jangka panjang tersebut Cina telah menginvestasikan hingga 50 miliar dolar dan mengerahkan beberapa perusahaan raksasa Cina ke Iran.

Perpecahan negara-negara Barat di satu sisi dan Cina di sisi lain berakibat pada terhentinya pembahasan rancangan resolusi DK PBB atas program nuklir Iran sebab hal ini terjadi setiap kali resolusi akan dikeluarkan. Sejak awal masalah nuklir Iran bergulir, Cina telah berada pada posisi yang berseberangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya, didukung oleh Rusia. Cina menolak penjatuhan sanksi atas Iran dan mengajukan penyelesaian lewat jalur dialog dan negosiasi. Cina senantiasa berargumen bahwa sanksi maupun embargo bukanlah solusi dalam menyelesaikan nuklir Iran. Sikap Cina yang menolak pemberian sanksi militer terhadap Iran merupakan bentuk kekhawatiran Cina terhadap aset-asetnya di Iran dan terganggunya suplai minyak ke Cina.

Pembahasan

Kebijakan politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari besarnya pengaruh yang diberikan oleh faktor internal dan eksternal terhadap negara yang bersangkutan. Dalam pandangan realis dari berbagai faktor yang ada, kepentingan nasional menempati urutan pertama yang harus menjadi fokus terhadap orientasi kebijakan politik luar negeri. Cina sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia terus mengalami peningkatan kebutuhan minyak dan gas dari tahun ketahun. Keterbatasan sumber daya energi tidak-terbarukan yang dimiliki Cina telah menjadikan negara ini tergantung pada

impor minyak dan gas dari negara lain. Oleh sebab itu diplomasi energi menjadi prioritas yang harus diperjuangkan oleh Cina, baik itu memelihara kerjasama yang telah ada ataupun mengupayakan kesepakatan-kesepakatan baru dengan negara-negara penghasil energi.

Kebijakan politik luar negeri Cina dalam menyikapi program nuklir Iran tidak terlepas dari besarnya nilai strategis kerjasama dengan Iran yang diperoleh selama ini. Investasi Cina di Iran dibidang energi untuk tahun 2009 saja mencapai 63 milyar Dolar AS, selain itu Iran juga menjamin keamanan pasokan gas ke Cina selama 25 tahun yang dimulai sejak tahun 2004. Impor minyak Cina dari Iran mencapai 12% dari total kebutuhan minyak didalam negeri. Oleh sebab itu bagaimanapun besarnya tekanan dari negara-negara Barat untuk menghentikan program nuklir Iran dan harapan kepada Cina untuk membatalkan semua kesepakatan dengan Iran terkait program nuklir ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan perilaku politik Cina. Meskipun dua perjanjian kerjasama dalam pengembangan nuklir Iran pernah dibatalkan, namun Cina masih memasok berbagai kebutuhan untuk kelancaran program nuklir Iran. Artinya pembatalan perjanjian dengan Iran tidak memiliki arti strategis dalam penghentian pelaksanaan program nuklir Iran

Dalam pendekatan model pengambilan kebijakan *the rational model* tindakan Cina ini dapat dipahami sebagai bentuk reaksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Iran jika sanksi lebih berat akan dijatuhkan. Dimana Iran akan menghentikan dan mengalihkan pasokan minyaknya jika negara tersebut turut mempersulit dan menerapkan sanksi atas Iran. Iran juga mengancam akan mengambil alih selat Hormuz jika sanksi militer dijatuhkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala angkatan darat Iran, Majid Mir Ahmadi pada 9 Januari 2007.

*“Given Iran's authority over the Strait of Hormuz, the passageway to more than 40 percent of the world's energi, we have become so strong that the world's economic and energi security are in the hands of Iran,”. “US allies, especially those who host US military sites or facilitate American strategies against us, are exposed to our threat,”*¹

¹ *Iran threatens to stop oil flow via Hormuz strait* <http://www.arabnews.com/?page=4§ion=0&article=90773>. Diakses pada 9 Agustus 2010

Dalam kalkulasi rasional, Cina tidak memiliki kepentingan strategis dalam pelaksanaan sanksi terhadap Iran. Justru Cina akan mengalami kesulitan mencari alternatif kebutuhan energi dari negara lain jika Iran mengalihkan penjualan minyaknya ke negara lain. Hal ini akan semakin sulit dengan telah disepakatinya kontrak pasokan gas dari Iran selama 25 tahun sejak tahun 2004. Cina juga memperhitungkan besarnya investasi yang ditanam di Iran dan aset-asetnya yang begitu besar hingga saat ini, sebab hingga tahun 2009 nilai investasi Cina dalam kontrak kerjasama dengan Iran telah mencapai 120 milyar Dolar AS.² Bila dibandingkan dengan tekanan Barat terhadap Cina untuk menghentikan kerjasamanya dengan Iran, maka akan lebih besar pengaruhnya terhadap kepentingan nasional jika Iran merealisasikan ancamannya untuk mengalihkan penjualan minyak dan gasnya.

Sedangkan dalam pendekatan kebijakan luar negeri *the adaptive model* dapat menjelaskan bagaimana Cina yang memiliki kekuatan militer namun memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya energi. Selain kuat secara militer dan ekonomi, Cina juga memiliki posisi tawar yang kuat dalam peran diplomatik di DK PBB. Cina termasuk dalam lima negara anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, oleh sebab itu keengganan Cina dalam melaksanakan sanksi terhadap Iran akan menjadi hambatan yang signifikan terhadap proses penegakan resolusi DK PBB. Dalam *the adaptive model* dapat dipahami pula bahwa sikap Cina untuk terus melakukan kerjasama dengan Iran dan menolak sanksi adalah semata-mata karena pertimbangan kepentingan nasional yang didasari atas keterbatasan sumber daya minyak dan gas yang dimiliki.

Kebutuhan minyak dan gas yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ketahun telah melahirkan kekhawatiran para pemimpin Cina, oleh sebab itu para pengambil kebijakan Cina menjadikan masalah keamanan energi sebagai agenda utama politik luar negeri. Bahkan dalam tulisannya, duta besar Cina untuk Iran mengatakan bahwa sejak negara tersebut tergantung dengan minyak luar negeri maka diplomasi Cina terhadap Iran sepenuhnya ditentukan oleh politik energi.

“This diplomacy in Iran after Cina became an oil importer in the early 1990s had been entirely dictated by energi politics”³

2 Freeman, Charles: *The China Factor in Iran's Nuclear Strategy*, Center for Strategic and International Studies. <http://csis.org/publication/china-factor-irans-nuclear-strategy>. diakses pada 14 Juli 2010

Cina memang memiliki sumber-sumber energi alternatif seperti nuklir dan batu bara. Energi nuklir dapat dipenuhi sendiri oleh Cina, sedangkan batu bara sebagian besar dipasok dari Australia.⁴ Namun kebutuhan Cina yang terbesar adalah minyak yang tidak dapat dipasok dari Australia. Cina sebenarnya dapat membeli minyak dan gas dipasar internasional, tetapi para pemimpin Cina tidak ingin kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi Cina tergantung pada pasar bebas yang sulit mereka percaya. Para pemimpin Cina menginginkan kontrol dan kepastian terhadap pasokan minyak dan gas. Mereka memandang cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui kesepakatan kerjasama dengan negara-negara penghasil minyak dan gas. Diantara negara-negara penghasil energi tersebut, negara yang dipilih adalah negara yang bertentangan dengan kekuatan politik Barat sehingga kebutuhan mereka untuk mendapatkan teman dan perlindungan akan lebih besar. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan hubungan saling ketergantungan sehingga Cina akan mendapat kepastian pasokan energi berdasarkan kontrak dan perjanjian sedangkan negara yang bersangkutan akan merasa terlindungi.

Kebijakan politik luar negeri Cina memilih negara penghasil minyak dan gas yang bertentangan dengan Barat semakin jelas ketika dikeluarkannya sanksi DK PBB terhadap Iran dan sanksi secara sepihak yang diterapkan Barat terhadap Iran. Cina dan Rusia adalah negara yang tidak melaksanakan sanksi kerjasama terhadap Iran, padahal kedua negara turut menyepakati resolusi terhadap Iran setelah berbagai poin revisi yang diajukan Cina dan Rusia disepakati. Pemberlakuan sanksi Barat terhadap Iran tersebut telah menimbulkan kekosongan investasi di Iran, sebab selama ini negara-negara Barat telah menanamkan investasinya disektor energi di Iran.

Kekosongan investasi disektor energi tersebut dipandang sebagai peluang kerjasama yang menjanjikan oleh pemerintah Cina. Sejalan dengan penerapan sanksi baru pada tahun 2009, Cina justru melakukan transaksi perdagangan dan investasi dengan Iran. Bahkan investasi tahun 2009 tercatat sebagai investasi terbesar Cina diantara tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai 63 milyar Dolar AS dibidang energi.⁵ Pemerintah Cina tidak menghiraukan desakan dari Barat untuk tidak melakukan kerjasama bisnis dan

3 Antoaneta Becker: *"As Sanctions Rise, China Steps Deeper Into Iran"*. <http://www.globalissues.org/news/6457>. diakses pada 21 Agustus 2010

4 Michael Danby: *"Beijing's friendship with Tehran makes war in the region more likely"* <http://www.realite-eu.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=9dJBLLNkGIF&b=2315291&ct=8432257>. Diakses pada 12 Agustus 2010

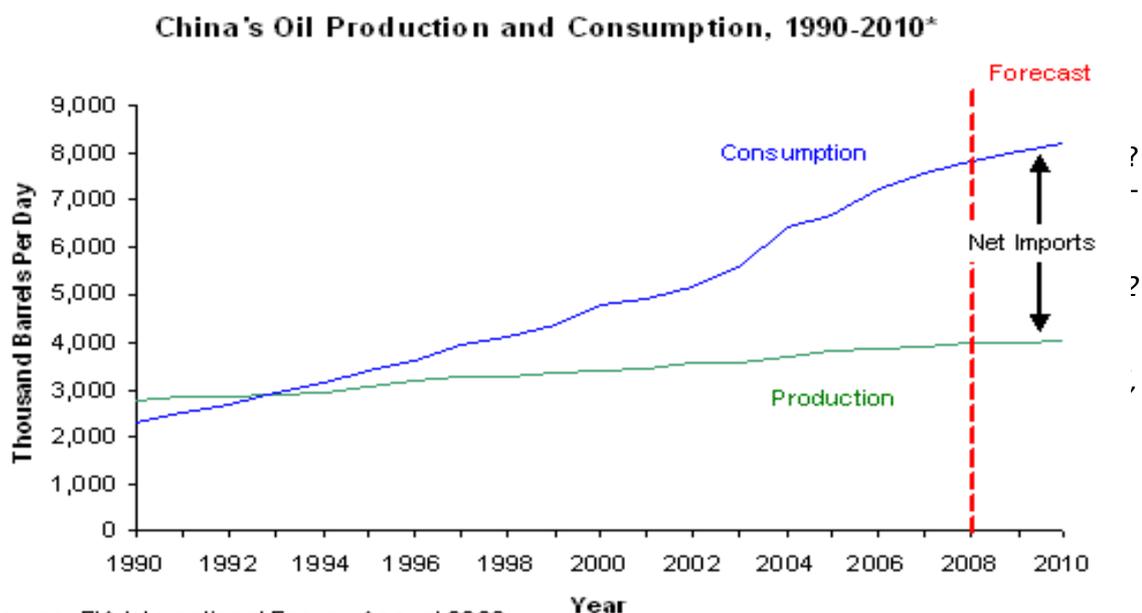
perdagangan minyak dengan Iran. Cina menganggap kerjasama dengan Iran sebagai kerjasama yang tidak terkait dengan sanksi dan tidak merugikan negara lain maupun komunitas internasional.

*“Cina and Iran's normal commercial exchanges did not breach any UN resolutions, and will not harm the interest of any other country or the international community”.*⁶

Cina selama ini berpandangan bahwa setiap negara yang telah tergabung dalam kesepakatan NPT memiliki hak dan akses yang sama terhadap teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Dalam pandangan Cina, Iran selama ini dinilai menjalankan program nuklirnya untuk kepentingan sipil dalam rangka diversifikasi energi dan pengembangan teknologi medis dan pertanian. Belum ada bukti ilmiah yang cukup yang mengindikasikan Iran secara nyata telah mengembangkan teknologi nuklirnya untuk keperluan militer.

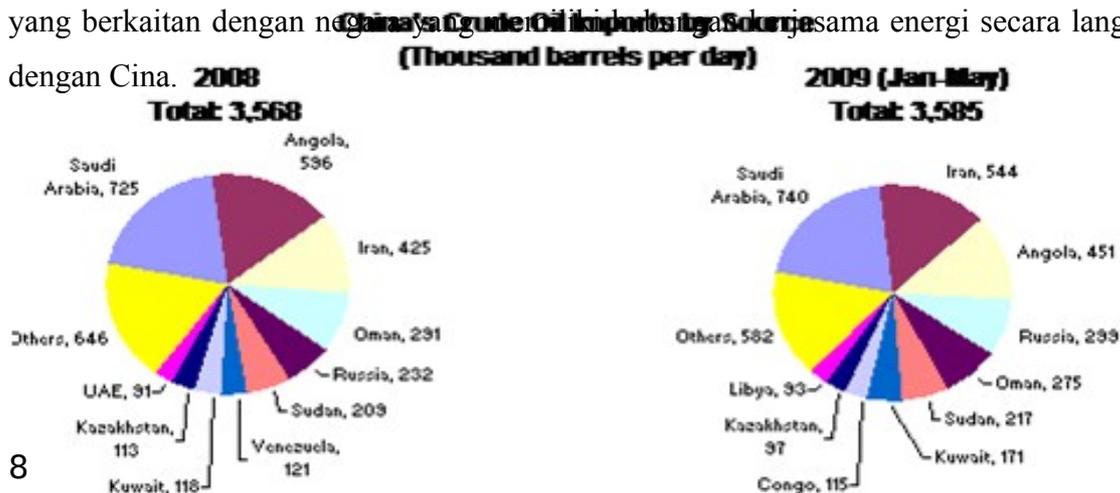
Ketergantungan Cina Terhadap Energi Negara Lain

Pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat pesat menuntut pemakaian energi yang semakin besar. Pesatnya pertumbuhan ekonomi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, akibatnya semakin banyak penduduk Cina yang menggunakan sepeda beralih menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu harga BBM di Cina relatif lebih murah bila dibandingkan dengan negara pengimpor minyak lainnya. Kebutuhan minyak Cina saat ini tidak sebanding dengan cadangan sumber daya minyak yang dimiliki Cina. Berdasarkan pada laporan konsumsi energi dunia yang dirilis oleh *British Petroleum* sejak tahun 2006 konsumsi minyak Cina telah mencapai angka 347 juta ton pertahun. Cina telah menempati



Terjadinya kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan kemampuan produksi didalam negeri telah menjadikan Cina sebagai negara kategori *net-imports* minyak pada tahun 2008. Jika dibandingkan antara kebutuhan yang terus meningkat dengan cadangan minyak dalam produksi tahunan didalam negeri. Maka pada tahun 2012 produksi minyak Cina diprediksi baru mencapai 100 juta ton, namun menurut perkembangan permintaan tahun 2006, maka diperkirakan pada tahun 2012, Cina masih perlu mengimpor 55% kebutuhan minyaknya dari negara lain.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, saat ini Cina telah menjalin kerjasama dengan negara-negara penghasil minyak terutama di Timur Tengah. Oleh sebab itu stabilitas dan keamanan Timur Tengah menjadi permasalahan penting bagi Cina khususnya yang berkaitan dengan negara-negara penghasil minyak sebagai mitra kerjasama energi secara langsung dengan Cina.



Source: EIA International Energi Annual 2009

Kebijakan Cina dalam Mewujudkan *Energy Security*

Masalah keamanan energi merupakan masalah ekonomi dan politik. keamanan energi memiliki beberapa efek turunan, hal ini mengindikasikan bahwa ketidakamanan energi akan berdampak pada munculnya ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Jika diperhatikan, masalah keamanan energi pada intinya akan mengarah pada keamanan minyak, sebab diantara sumber energi global yang menjadi kebutuhan semua negara, minyak menempati urutan pertama. Karena nilai strategisnya, minyak telah menjadi senjata dalam konflik politik dan diplomasi internasional.

Besarnya kebutuhan energi dan tuntutan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi telah membuat para pengambil kebijakan Cina mencoba berbagai cara untuk mengamankan pasokan energi. Dalam buku putih pertahanan Cina tahun 2008 masalah energi menjadi perhatian penting bagi pemerintah Cina dalam strategi kebijakan luar negeri. Langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpin Cina antara lain dengan melakukan usaha diversifikasi energi, mencari importir baru dibidang energi, mengeluarkan kebijakan yang mempermudah investasi

langsung di sektor energi serta peningkatan pembangunan minyak dan gas didalam dan luar negeri.

Upaya Cina yang begitu gencar mencari sumber-sumber energi baru diluar kawasan telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Barat khususnya AS. Sebab Cina melakukan pendekatan bilateral terhadap negara-negara penghasil minyak yang “menentang” kebijakan AS. Diantaranya Cina membangun kerjasama dengan Iran, Myanmar, Korea Utara, Pakistan, Angola dan Zimbabwe serta Sudan dan negara-negara Amerika Latin. Menyaksikan pertumbuhan ekonomi dan kekuatan akses terhadap sumber-sumber energi telah menimbulkan kekhawatiran AS akan lahirnya kekuatan baru yang akan mempengaruhi kekuatan unipolaritasnya di dunia.

Cina dalam melakukan pendekatan kerjasama terhadap negara-negara penghasil minyak tidak menjadikan masalah HAM sebagai prasyarat kerjasama. Hal ini semakin memudahkan Cina mencapai kesepakatan, sebab sebagian besar negara-negara penghasil minyak memiliki permasalahan HAM yang menjadi sorotan Barat. Dalam rangkaian kunjungan ke Afrika pada tahun 2007, presiden Cina mengumumkan pemberian pinjaman pada Afrika senilai 3 miliar dollar AS dan berbagai bantuan lainnya dalam 3 tahun.

Diplomasi minyak yang dilakukan Cina memiliki lima fokus perhatian terhadap negara-negara penghasil minyak:

1. Memperkuat hubungan politik dengan negara-negara pengekspor minyak melalui hubungan bilateral untuk memperoleh hak pemanfaatan ladang minyak.
2. Memberikan penekanan pada manfaat praktis dari hasil diplomasi berupa jaminan pasokan minyak ke Cina secara aman.
3. Pencegahan terhadap upaya diplomatik negara ketiga yang berusaha mengganggu kerjasama energi bilateral dengan Cina.
4. Peningkatan upaya diplomatik terhadap negara “musuh” yang berusaha melaksanakan embargo perdagangan minyak dengan Cina.
5. Menjadikan keamanan energi sebagai dasar keamanan nasional dan visi strategis negara.
6. Mondorong kegiatan eksplorasi energi luar negeri Cina melalui BUMN.

7. Membangun kekuatan diplomasi yang berbasis kepentingan minyak.⁸

Cina memiliki kepentingan khusus dengan Timur Tengah, sebab dari kawasan ini Cina memperoleh 45% kebutuhan minyaknya. Selain mendapatkan jaminan kerjasama pasokan minyak, Cina juga melihat Timur Tengah sebagai lahan investasi energi yang menjanjikan untuk jangka panjang. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa kawasan Timur Tengah memiliki 55% cadangan minyak dunia. Oleh sebab itu menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan ini adalah langkah awal menuju keamanan energi saat ini dan masa depan.

Diplomasi energi yang ditujukan bagi keamanan energi telah menjadi batu kunci diplomatik Cina untuk membangun hubungan jangka panjang, bersahabat dan kooperatif. Dasar strategi diplomasi Cina adalah memperluas pengaruhnya dikawasan dan mempertahankan hubungan tradisional dengan Timur Tengah khususnya dengan Iran. Selain itu Cina mulai mengambil keuntungan minyak dan gas dari posisi geopolitiknya yang berada disekitar negara-negara penghasil minyak, terutama dimulainya konsolidasi minyak dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah.

Upaya-Upaya Diplomatik Terhadap Barat

Cina telah menunjukkan dukungannya terhadap hak-hak Iran untuk memiliki teknologi nuklir damai. Sejak permasalahan nuklir Iran dibawa ke DK PBB yang diprakarsai Barat untuk pertama kalinya, Cina telah menunjukkan sikap menolak. Cina yang didukung Rusia memandang kekhawatiran Barat terhadap program nuklir Iran sebagai sesuatu yang berlebihan. Sebab sejak Iran mengumumkan untuk melanjutkan program nuklirnya pasca revolusi, Barat tidak terlibat dalam pengembangan proyek tersebut sehingga Barat kehilangan kontrol terhadap perkembangan teknologi nuklir Iran. Namun bagi Cina dan Rusia yang terlibat secara langsung menggantikan peran Barat menganggap program tersebut sebagai hak Iran untuk mendapatkan teknologi nuklir damai.

8 *China foreign policy energy 2009*, <http://www.marshallfoundation.org/documents/ChinaForeignPolicyEnergy.pdf>. diakses pada 13 Juli 2010

Namun demikian, Cina tetap memandang upaya Barat dalam menghentikan program nuklir Iran akan tetap memiliki pengaruh terhadap stabilitas hubungan Cina-Iran. Hal ini akan semakin sulit ketika Israel merasa terancam dengan tindakan Iran dan berencana menyerang fasilitas nuklir Iran. Jika ancaman Israel tersebut direalisasikan dan didukung oleh Barat, maka bukan hanya stabilitas hubungan Cina-Iran yang akan terganggu namun stabilitas kawasan Timur Tengah akan mengalami gangguan. Dampak yang kemudian akan timbul adalah terganggunya pasokan minyak dari kawasan ini termasuk terhentinya pasokan minyak Iran ke Cina. Mengingat kawasan ini menyuplai 40% kebutuhan minyak dunia.

Melihat kenyataan tersebut, Cina memposisikan dirinya secara pragmatis untuk mengamankan kepentingannya atas Iran dan meredam keinginan Israel yang didukung Barat untuk memulai aksi militer. Sikap ini tampak dari tindakan Cina yang menyetujui sanksi terhadap Iran selama sanksi tersebut tidak berkaitan dengan masalah energi dan penggunaan kekuatan militer untuk menekan Iran. Namun demikian tidak mudah bagi Cina untuk menyetujui resolusi DK PBB, setiap resolusi terhadap Iran selalu melewati perundingan panjang dan dalam proses ini Cina senantiasa mengajukan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap merugikan hubungan negaranya dengan Iran.

Pada bulan Desember 2009, pertemuan anggota tetap DK PBB (P5+1) gagal dilaksanakan. Kegagalan ini disebabkan oleh penolakan Cina terhadap pertemuan yang akan membahas sanksi baru terhadap Iran. Cina hanya bersedia memulai pembicaraan tentang sanksi terhadap Iran yang telah ada, namun tidak setuju dengan agenda pembahasan sanksi baru atau peningkatan sanksi. Cina juga mengecam sikap Barat yang menerapkan sanksi sepihak terhadap Iran dan menyatakan AS seharusnya tidak mengambil sanksi diluar PBB. Sikap Cina yang didukung Rusia ini mendapat kecaman dari Barat sebagai penentang PBB sebagaimana yang disampaikan oleh diplomat Barat, Robert Cooper "*Cina is now taking a harder line than Russia in opposing further UN sanctions against Tehran*"⁹

9 George L. Simpson, Jr, *Russian and Chinese Support for Tehran; Iranian Reform and Stagnation*,. Journal; The middle east forum, Spring 2010 • Volume XVII: Number 2. P.63-72.

<http://www.meforum.org/2690/russian-chinese-support-for-iran>. diakses pada 28 Juli 2010

Upaya-Upaya Diplomatik Melalui DK PBB

Mekanisme pengambilan keputusan DK PBB senantiasa diakhiri dengan voting untuk menentukan sikap mayoritas anggota. Cina memiliki pengaruh yang signifikan dalam setiap pengambilan keputusan DK PBB, khususnya yang berhubungan resolusi terhadap Iran. Cina merupakan salah satu dari lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto. Meskipun selama proses penjatuhan sanksi terhadap Iran Cina belum pernah menggunakan hak vetonya, namun bukan berarti pemerintah Cina mendukung pemberlakuan sanksi terhadap Iran.

Cina berprinsip bahwa tindakan yang dilakukan oleh DK PBB tentang masalah nuklir Iran harus berpegang pada tiga prinsip dasar, *pertama* tindakan yang diambil harus memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penguatan terhadap kesepakatan NPT. Sebagai anggota NPT, Iran telah bersedia bekerjasama dengan IAEA sehingga hak untuk menggunakan energi nuklir damai harus sepenuhnya dihormati dan dijaga. *Kedua* tindakan DK PBB harus menciptakan situasi yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah terutama daerah Teluk. *Ketiga* harus membantu dalam memulihkan perekonomian dunia dan menghindari dampak pada kehidupan normal rakyat Iran dan ekonomi serta tidak mengganggu hubungan perdagangan antara Iran dengan negara lain. Tindakan yang diambil DK PBB harus sesuai dengan realitas dilapangan, memiliki sasaran yang jelas dan harus memperkuat upaya diplomatik dalam menyelesaikan masalah nuklir Iran.

Pada dasarnya Cina ingin kembali menegaskan sikapnya, bahwa teknologi nuklir untuk damai adalah hak semua anggota NPT dan sanksi tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan mendasar yang sesungguhnya. Sebab untuk menghasilkan penyelesaian yang komprehensif dan sesuai dengan masalah yang dihadapi sangat penting untuk kembali kejalur dialog dan negosiasi.

Dalam pernyataan pers rutusnya, juru bicara kementerian luar negeri Cina Qin Gang menyatakan bahwa sikap Cina tidak berubah dalam masalah nuklir Iran. Cina tetap tidak menyetujui sanksi sabagai

upaya menyelesaikan masalah *"We will continue to work with all parties towards the solution of the Iranian nuclear issue through diplomatic and peaceful means. Under current circumstances, we hope relevant parties can show flexibility and make efforts for a solution of the Iranian nuclear issue through diplomacy."*¹⁰

Memperkuat Hubungan Bilateral dengan Iran

Ditengah permasalahan nuklir Iran yang terus bergulir, Cina justru semakin memperkuat kerjasama dengan Iran. Dibidang investasi, perdagangan dan politik semakin ditingkatkan. Fakta ini menunjukkan bahwa meski sanksi ekonomi telah disepakati terhadap program nuklir Iran, namun Cina termasuk negara yang sebenarnya menolak pemberlakuan sanksi tersebut. Diatas meja perundingan dalam membicarakan sanksi Cina senantiasa menyatakan bahwa sanksi bukanlah solusi dalam masalah nuklir Iran dan setiap negara berhak menentukan mitra kerjasama dan membeli barang-barang kebutuhannya sendiri tanpa harus ada yang membatasi. Sejak dikeluarkannya resolusi tahun 2006 terhadap Iran, Cina tidak pernah melaksanakan sanksi terhadap Iran sebagaimana yang dikehendaki dalam ketetapan resolusi. Baik dibidang perdagangan, keuangan maupun bantuan terhadap program nuklir Iran.

Cina selalu memberikan penjelasan kepada Iran ketika negaranya menyetujui resolusi DK PBB terhadap Iran. Dalam penjelasannya Cina mengatakan bahwa telah berusaha bersungguh-sungguh dan terlibat secara aktif dalam konsultasi setiap rancangan resolusi dan bekerja keras bahwa setiap resolusi harus sesuai dengan prinsip-prinsip politik luar negeri Cina terhadap Iran.¹¹ Cina juga selalu menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan secara damai masalah nuklir Iran dan berharap pihak-pihak terkait bersedia kembali melakukan perundingan atas dasar kesetaraan dan saling menghormati,

¹⁰ Foreign Ministry Spokesperson Qin Gang's Regular Press Conference on March 30, 2009, <http://www.mfa.gov.cn/eng/xwfw/s2510/2511/t676617.htm>. diakses pada 13 Juli 2010

¹¹ *Explanation of Vote by Ambassador Li Baodong on New Security Council Resolution on Iranian Nuclear Issue 2009*, <http://www.chinaembassy.ir/eng/dtxw/t707743.htm>. diakses pada 18 Agustus 2010

memperkuat kontak dan dialog serta memupuk rasa saling percaya dan mencari solusi yang dapat diterima untuk semua pihak untuk memulai kembali perundingan.

Simpulan

Kebijakan luar negeri Cina mendukung program nuklir Iran merupakan implementasi dari sekumpulan orientasi kepentingan nasional. Pilihan kebijakan tersebut merupakan suatu langkah berani pemerintah Cina, sebab Iran merupakan negara yang “dimusuhi” oleh Barat sejak Iran melanjutkan program nuklirnya. Meski demikian kebijakan ini telah melalui proses kalkulasi rasional yang dianggap sebagai kebijakan strategis dalam mewujudkan keamanan energi. Konsekwensinya Cina harus berhadapan dengan kekuatan Barat dalam merealisasikan kebijakan tersebut.

Pemerintah Cina mengedepankan upaya-upaya diplomasi dan politik dalam menghadapi hambatan-hambatan kebijakan strategis tersebut, baik terhadap Iran maupun negara-negara Barat. Cina melibatkan diri dalam program pengembangan nuklir Iran sejak awal tahun 1990an yang meliputi penyediaan reaktor, pelatihan tenaga ahli dan pendampingan dalam pengoperasian reaktor nuklir. Sedangkan melalui DK PBB Cina menjadi negara yang menolak sanksi sebagai strategi penyelesaian masalah nuklir Iran. Meski Cina mendukung program nuklir Iran namun tidak berarti Cina oposisi terhadap Barat.

Sikap Cina mendukung program nuklir Iran tidak terlepas dari faktor ekonomi. Cina sejak satu dekade terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat yang mendorong besarnya permintaan energi (minyak dan gas) dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Kendala yang dihadapi pemerintah Cina adalah tidak tersedianya sumber energi di dalam negeri yang cukup, sehingga menuntut pemerintah Cina untuk mencari sumber-sumber energi di luar negeri. Dalam upaya mendapatkan sumber energy tersebut Cina tidak ingin tergantung pada pasar internasional, sebab pasar energi internasional relatif sulit untuk dikontrol baik sumber, harga maupun tingkat kontinuitas pasokan yang berarti pasar

internasional dianggap tidak memberi jaminan keamanan energi. Pemerintah Cina memandang kekuatan diplomasi dan kerjasama langsung dengan negara-negara penghasil energi lebih strategis dalam mewujudkan keamanan energi karena memiliki akses langsung terhadap sumber energi dan adanya jaminan pasokan dalam jangka waktu tertentu.

Kuatnya diplomasi Cina terhadap Iran terlihat dengan semakin kuatnya hubungan kerjasama kedua negara meskipun resolusi DK PBB menghendaki negara-negara anggota PBB untuk menerapkan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Iran. Ditengah tekanan dunia internasional, khususnya Barat terhadap Iran namun pemerintah Cina justru semakin meningkatkan kerjasama ekonomi dan energi dengan Iran.

Daftar Pustaka

- A. Etemad (1987). *"Iran," in, "European Non-Proliferation Policy,"* edited by H. Mueller. London: Oxford University Press.
- Garver (2006). *Sino-Iran Relations; Ancient Partners building a Post-Imperial World.* Washington: University of Washington Press.
- Holsti K.J. (1997), *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis,* terj. M. Tahir Azhary, SH. Jakarta; Erlangga, 1998.
- Jensen Lloyd (1982). *Explaining Foreign Policy.* Prentice Hall: Temple University.
- Iran threatens to stop oil flow via Hormuz strait*
[http://www.arabnews.com/?page=4§ion=0&article=90773.](http://www.arabnews.com/?page=4§ion=0&article=90773)
Diakses pada 9 Agustus 2010.
- Freeman, Charles: *The China Factor in Iran's Nuclear Strategy,* Center for Strategic and International Studies.
[http://csis.org/publication/china-factor-irans-nuclear-strategy.](http://csis.org/publication/china-factor-irans-nuclear-strategy)
diakses pada 14 Juli 2010.

Antoaneta Becker: *“As Sanctions Rise, China Steps Deeper Into Iran”*.
<http://www.globalissues.org/news/6457>. diakses pada 21 Agustus 2010.

Michael Danby: *“Beijing's friendship with Tehran makes war in the region more likely”*
<http://www.realite-eu.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=9dJBLLNkGiF&b=2315291&ct=8432257>. Diakses pada 12 Agustus 2010.

Chin-Iran relations, <http://www.irantracker.org/global-business-in-iran?country=727&contractor=All&client=All§or=825&amount=0&status=All&apply-block=Refine>. Diakses pada 13 Agustus 2010.

Lin Liangxiang, *“Energy First: China in the Middle East,” Middle East Quarterly2 2009*, <http://www.meforum.org/article/694>. diakses pada 20 Agustus 2010.

China denounces new unilateral US. sanction on Iran,
<http://www.reuters.com/article/idUSTRE6711GO20100802>.
diakses pada 9 Agustus 2010.

George L. Simpson, Jr, *Russian and Chinese Support for Tehran; Iranian Reform and Stagnation*,. Journal; The middle east forum, Spring 2010 • Volume XVII: Number 2.

<http://www.meforum.org/2690/russian-chinese-support-for-iran>. diakses pada 28 Juli 2010

Foreign Ministry Spokesperson Qin Gang's Regular Press Conference on March 30, 2009,
<http://www.mfa.gov.cn/eng/xwfw/s2510/2511/t676617.htm>.
diakses pada 13 Juli 2010.

Explanation of Vote by Ambassador Li Baodong on New Security Council Resolution on Iranian Nuclear Issue 2009,
<http://www.chinaembassy.ir/eng/dtxw/t707743.htm>. diakses pada 18 Agustus 2010.